

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencucian Uang* (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Andi Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Barry. *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. (Surabaya: Indah Surabaya, 1996).
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford University Press 1996).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Depok: Prenada Media Group, 2016).
- Donelly, Jack. *Universal Human Rights In Theory and Practice* (United States of America: Cornell University Press, 2003)
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Hasbullah, Misri. *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group 2019)
- Husin, Budi Rizky Kadri. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ibrahim, Jhonny, dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenada Media Group, 2016).

- Kartayasa, Mansur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2022).
- Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: P.T Alumni, 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Mochtar, M. Akil. *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*. (Jakarta: Q-Communication, 2006).
- Nasution, Bismar. *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*. (Bandung: Books Terrace & Library, 2009).
- Pangabean, P. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori dan Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020).
- Prasetijo Rijadi, dan Jonandi Effendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)* (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Radbruch, Gustav. 'Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht' 1946 (reprinted in Radbruch, *Gesammelte Schriften* vol 3 CMC Mohr 1993).
- Ridha Hakim, Bettina Yahya, dan Budi Suhariyanto. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017).
- Seno Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana, Ctk.Kedua*, (Jakarta: Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

Surachmin, Suhandi. *Strategi & Teknik Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Syahrums, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris*. (Riau: DOTPlus Publisher, 2022).

Wibowo Muhamad, I Made Gede Bamaxs, Wisnu Murtopo Nur, Riki Saputra, Mochamad Fitri Adhy, dan Dimas Pranowo. *Problematika Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023).

Yanuar, M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2007).

Yunus Husein. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019).

Yusuf, M. *Merampas Aset Koruptor* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal:

Abdul Kholiq, M. et al., “Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 20 (2002): 55–67, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4939>.

Aji, Ari Wisnu, dan Pujiyono Nyoman Serikat Putrajaya. “Peran Kejaksaan dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

Alhuda, Bukhari. “Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022).

Baharuddin Badaru Riswana and Sufirman Rahman, “Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi,” *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 2 (2024).

Baldwin Jr., Fletcher N. *Money Laundering and Wire Transfers: When the New Regulations Take Effect Will They Help?*, Penn State International Law Review, Vol. 14, No. 3 (1996).

Basri, Hasan. “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021).

Borlini, Leonardo et al., “International Asset Recovery: Origins, Evolution and Current Challenges,” (2014): 28, <https://www.researchgate.net/publication/290440738>.

Corruption Watch, Indonesia. “RUU Tindak Pidana Korupsi”. *Usulan Draft Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Versi Masyarakat Sipil*, (2015).

Dalimunthe, Juangga Saputra. “Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 2 (2020).

Datuan Malto S. et al., “Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,” *USU Law Journal* 5, no. 2 (2017).

Djufri, Kinaria Afriani Darmadi, dan Derry Angling Kesuma. “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Disiplin* 26, no. 2 (2020).

Effendy, Marwan. “Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39, no. 1 (2009).

Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila, “Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (July 2022).

Hamamah, Fatin, dan Heru Hari Bahtiar. “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).

Hasibuan, Syaiful Asmi, dan Ivan Freyser Simorangkir. “Analisis Hukum terhadap Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).

Itok Dwi Kurniawan, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Mengoptimalkan Pemulihan Aset Hasil Korupsi,” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2024).

Karunia, Ana Aniza. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022).

Kholiq, M. Abdul et al. “Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 20 (2002).

Kinaria Afriani Darmadi Djufri and Derry Angling Kesuma, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Disiplin* 26, no. 2 (2020).

Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Afdhal Fadhila. “Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022).

Kurniawan, Itok Dwi. “Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Mengoptimalkan Pemulihan Aset Hasil Korupsi.” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2024).

Manalu, Sahata. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021).

Miladmahesi, Rosita. “Dinamika Baru dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 2, no. 1 (2020).

Manullang, Herlina Yohana Eirene Aprilita Aritonang, dan July Esther, “Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai),” *Nommensen Law Review* 1, no. 1 (2022).

Mukaromah, Ema Nurul dan Hasuri, “Konsep Pembuktian Terbalik terhadap Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM” *Adliya:*

Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, (2020) 14(2),
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/9605/pdf>.

Muladi, "Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversal Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)," *Majalah Varia Peradilan* (July 2001).

Muliawan, Anatomi, dan Carli Caniago. "Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Gratifikasi." *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010).

Mulyadi, Lilik. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003" *Badilum Mahkamah Agung*.
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf.

Nagin, D. S. "Deterrence: A review of the evidence by a criminologist for economists", *Annual Review of Economics*, no. 5 (2013): 83–105.
<https://doi.org/10.1146/annurev-economics-072412-131310>.

Paternoster, R. "How much do we really know about criminal deterrence?". *Journal of Criminal Law and Criminology*, no. 100 (2016): 765–823.
<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol100/iss3/3>.

Pranoto, Agus, Abadi B. Darmo, dan Iman Hidayat. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).

Purwadi, Hari. "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2016).

Qemal Candra Maulana, Dina Mariana, and Bintang Olga Natalia Saragih, "Penyitaan Aset sebagai Upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 5, no. 8 (2022).

Ramadhan, Choky R. "Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 9, No. 2, (2023).

Riswana, Baharuddin Badaru, dan Sufirman Rahman. "Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi." *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 2 (2024).

Rosita Miladmahesi, "Dinamika Baru dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia," *Journal of Judicial Review* 2, no. 1 (2020).

Sahetapy, J.E. Lokakarya, Anti Korupsi di Jakarta, 27 Maret 2007.

Samosir, Agustinus. "Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (June 2017).

Santoso, D. "Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 3 (2022).

Saputro, Heri Joko, dan Tofik Yanuar Chandra. "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Aset sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021).

Stephenson, M. Kevin et al., *Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action* (Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2011).

Stolpe, Oliver. *Meeting the Burden of Proof in Corruption-Related Legal Proceedings*, unpublished, cited in Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*.

Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020).

Syaifulloh, Abvianto. "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019).

Syauk, Achmad et al., “Efektivitas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi di *Pengadilan* Negeri Makassar,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (December 2024).

Widodo, Eddyono Supriyadi, “Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (June 2011).

Wiriadinata, Wahyu. “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012).

Tesis

Hidayat, Fahril, “Pengembalian Aset Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, 2023.

Karina, Shafa, ”Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Perampasan In Rem”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Mugiandono, Achmad Aris, “Efektivitas Penelusuran Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Universitas Jenderal Soedirman, 2023.

Purwanto, Heri. “Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti”, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Setyowati, Sulis, ”Pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangan tindak pidana korupsi”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2010.

Sumanti, J.J.E., ”Kebijakan Hukum Pidana tentang Implementasi Konsep Non-Conviction Based *Asset Forfeiture* dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 4).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 67 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan The International Covenant On Civil and Political Right (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 119 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 711).

Internet

Hasbullah, Misri. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Prenadamedia Group 2019); Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008); dan Lilik Mulyadi, Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI 2020.https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf.

Husein, Yunus. "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."pshk.or.id. https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan_2019.pdf.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Selama 2023, KPK Pulihkan Aset Negara Sebesar Rp525 Miliar", Jakarta, 2024 <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/selama-2023-kpk-pulihkan-aset-negara-sebesar-rp525-miliar> .

Mardianti, Dede Leni. "Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun, tapi yang Kembali hanya Rp 7,3 Triliun." Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/catatan-icw-soal-tren-vonis-korupsi-2023-kerugian-negara-mencapai-rp-56-triliun-tapi-yang-kembali-hanya-rp-7-3-triliun-85377>.

Mulyadi, Lilik. "Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi" Badilum Mahkamah Agung. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf.

Ramelan, "Laporan Akhir Naskah Akademik.Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." BPHN.go.id.
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf.

Reisalinda Ayuningsih, Irma. "*Mengadopsi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pengurusan Piutang Negara*".
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.html>.

Lain-lain:

Tedhalosa, Adhing. Wawancara Penelitian, 2025.

Prayogo, Romano Suryo. Wawancara Penelitian, 2025.